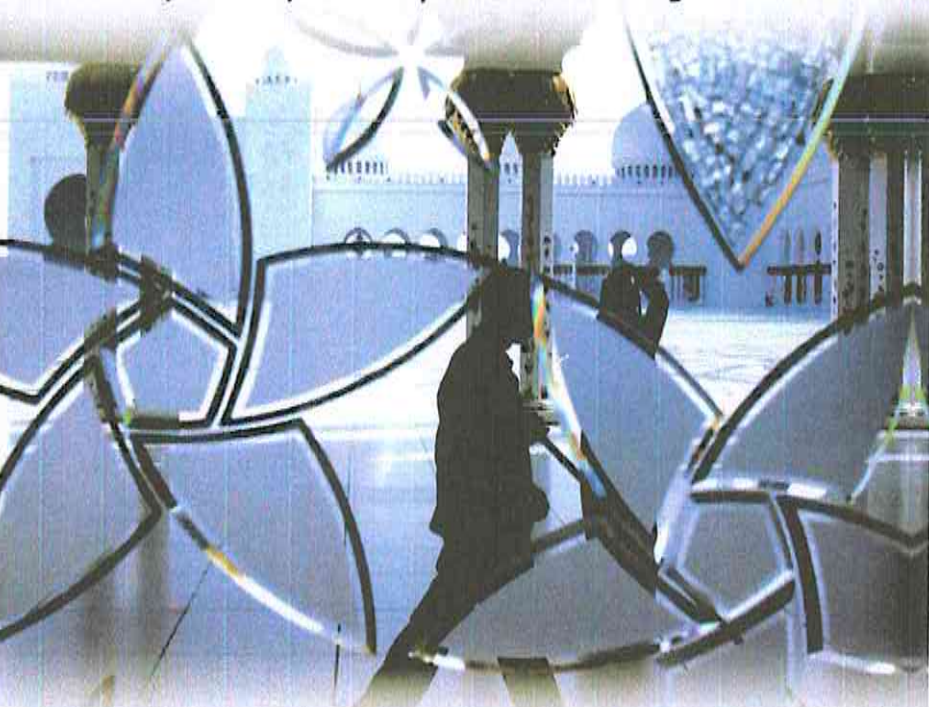


Prinsip Dasar
**EKONOMI
ISLAM**

Perspektif Maqâshid al-Syarî'ah



Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I.

Dr. Abdul Kadir Riyadi, Lc., M.S.Sc.

Prinsip Dasar
**EKONOMI
ISLAM**

Perspektif Maqâshid al-Syarî'ah

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Prinsip Dasar
**EKONOMI
ISLAM**

Perspektif Maqâshid al-Syarî'ah

DR. IKA YUNIA FAUZIA, LC., M.E.I.
DR. ABDUL KADIR RIYADI, LC., M.S.SC.



PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM
Perspektif Maqāshid al-Syarfiah

Edisi Pertama
Copyright © 2014

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-7985-58-2 297.63
13.5 x 20.5 cm
xvi, 308 hlm

Cetakan ke-3, Juni 2018

Kencana. 2014.0469

Penulis

Dr. Ika Yunia Fauziah, Lc., M.E.I.
Dr. Abdul Kadir Riyadi, Lc., M.S.Sc.

Desain Sampul

tambra23@yahoo.com

Penata Letak

Endang Wahyudin

Percetakan

PT Adhitya Andrebina Agung

Divisi Penerbitan

KENCANA

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP

Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

al-syarî'ah. Harapan yang terbesar dari penulis, semoga buku ini bisa menjadi amal saleh dari penulis dan bisa mendekatkan pembacanya ke dalam kemaslahatan (*al-mashlahah*), serta menjauhkan pembacanya dari 'kerusakan' (*al-mafsadah*) di muka Bumi ini. Dengan cara merealisasikan berbagai macam aktivitas yang bermuara pada kemaslahatan publik.

Embrio buku ini awalnya adalah tesis yang ditulis oleh Ika Yunia Fauzia yang berjudul "Konsep *maqâshid al-syarî'ah* sebagai Dasar Ekonomi Kesejahteraan" dalam menyelesaikan studinya di Program Magister Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya pada 2008. Pada perkembangan selanjutnya, ada beberapa perbaikan yang dihasilkan dari "musyawarah singkat dan diskusi kecil di meja makan" yang dilakukan oleh Ika Yunia Fauzia dan suaminya Abdul Kadir Riyadi, sehingga buku ini bisa terselesaikan dengan baik.

Penulis menghaturkan beribu terima kasih kepada beberapa pihak yang turut serta memberikan masukan kepada penelitian ini, di antaranya Dr. Joko Subagyo, Prof. Dr. K.H. Sjechul Hadi Permono, S.H. (almarhum), dan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro. Tak lupa semua guru penulis yang telah ikhlas mentransformasi ilmunya, semoga amal ibadah mereka diterima Allah SWT. Terima kasih juga penulis haturkan kepada keempat orangtua penulis, H. Abdul Salam Riyadi (almarhum), Hj. Djuwairiyah, H. Imron Rosyadi, dan Hj. Anisah Juana. Semoga Allah selalu mengaruniai kehidupan yang penuh keberkahan. Amin.

Penulis berharap buku ini bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ekonomi Islam di masa mendatang, dan mampu memicu pembacanya untuk melakukan amal saleh. Terakhir kalinya, penulis memohon maaf jika ter-



BAB 7 PRINSIP DASAR KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM	161
A. Konsep Islam tentang Kebutuhan.....	161
B. Konsep Mashlahah dalam Konsumsi Sesuai dengan Maqâshid al-Syarî'ah.....	165
C. Mashlahah dalam Income dan Expenditure	169
D. Aplikasi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Final Spending.....	174
E. Budaya Konsumerisme sebagai Antitesis Maqâshid al-Syarî'ah	180
F. Perkembangan Budaya Konsumerisme	182
G. Beberapa Faktor Tersebarinya Budaya Konsumerisme	184
H. Konsumerisme vs. Keseimbangan Konsumsi dalam Ekonomi Islam	187
BAB 8 PRINSIP DASAR MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM	197
A. Pasar pada Permulaan Islam.....	197
B. Pasar pada Masa Rasulullah.....	200
C. Beberapa Distorsi dalam Pasar Perspektif Islam..	204
D. Lembaga Hisbah sebagai Bentuk Pengawasan Pasar.....	213
E. Mekanisme Pasar Menurut Abu Yûsuf (731-798 M/113-182 H).....	216
F. Evolusi Pasar Menurut al-Ghazali (1058-1111 M/450-505 H).....	218
G. Pasar Menurut Ibn Taimiyah (1263-1328 M/661-728 H).....	220
H. Keseimbangan Harga Menurut Ibn Khaldûn (1332-1404 M/732-808 H).....	222



A. PENGERTIAN EKONOMI ISLAM

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara.

Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut *ilmu ekonomi*. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan *ilmu ekonomi* tersebut adalah: "Salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya."¹ Adapun dalam bahasa Inggris, kalimat 'ekonomi-politik' muncul pertama kalinya pada 1615, kemudian

¹ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Ed. 3, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 3.



BAB 2

Konsep Maqâshid al-Syari'ah dan al-Mashlahah dalam Ekonomi Islam

A. PENGERTIAN MAQÂSHID AL-SYARI'AH

Secara etimologi *maqâshid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqâshid* dan *syari'ah*. *Maqâshid* adalah bentuk jamak dari *maqshûd* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *syari'ah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.

Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqâshid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

1. Al-Imam al-Ghazali:

فرعاية المقاصد عبارة حاوية للا بقاء ودفع القواضع والتحصيل
على سبيل اللآ بتداء.¹

"Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan".

¹ Al-Ghazali, *Shifâ al-Ghalîl*, Taḥqîq Hamdi Ubaid al-Kabîsî, (Baghdad: Mathba'ah al-Irshâd, 1971) 159. Lihat juga Bin Zaghîbah Izz al-Dîn, *Al-Maqâshid al-Âmmah li al-Syari'ah al-Islâmiyah* (Kairo: Dâr al-Shafwah li al-Thabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî', 1996) 40.



berkaitan dengan hak orang lain. Terkait dengan keterbatasan manusia dalam merealisasikan tujuan *syara'* selain kekhilafan, ada hal-hal lainnya yang menyebabkan terabaikannya *mashlahah*. Akan tetapi sebab-sebab tersebut termasuk dalam bahasan tentang keringanan.¹⁶ Abu Zahrah menyebutkan bahwa cara untuk mengetahui *mashlahah* sebagian telah jelas, dan sebagian lainnya belum jelas. Karena dalam kehidupan individu dan masyarakat, manusia sering kali diuji dengan beragam masalah yang mana mereka tidak tahu mana sisi benar dan *mashlahah*-nya. Karena itu perlu diadakan kajian tentang *mashlahah* itu sendiri.

E. PEMBAGIAN MASHLAHAH

—Pembagian *mashlahah* secara umum menjadi tiga bagian:

1. *Al-Mashlahah al-Mu'tabarah*.
2. *Al-Mashlahah al-Mulghâh (al-Mashlahah al-Mardûd)*.
3. *Al-Mashlahah al-Mursalâh*.

Pertama, *al-mashlahah al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang bisa dijadikan *hujjah* dan tidak diragukan lagi penggunaannya. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, kemaslahatan ini dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Maka kemaslahatan seperti ini lazim dijadikan titik tolak penetapan hukum. Untuk bahasan tentang *mashlahah* ini, hampir semua ulama sepakat untuk menerima *al-mashlahah al-mu'tabarah*, karena bentuk kemaslahatan ini tertera dalam Al-Qur'an dan Hadis.

¹⁶ Izz al-Dīn Abd al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Mashālih al-Anām*, Juz 1 & 2, (Beirut Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.).



al-Nafs);³² (3) penjagaan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*);³³ (4) penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*);³⁴ dan (5) Penjagaan terhadap harta benda (*Hifz al-Mâl*).³⁵

Apabila kelima hal di atas dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa dikenal dengan *falāh*. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah*, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang.

safat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) 67-70.

³² Dalil tentang penjagaan terhadap jiwa bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat *al-Baqarah* [2]: 178-179, *al-An'ām* [6]: 151, *al-Isrā'* [17]: 31, *al-Isrā'* [17]: 33, *an-Nisā'* [4]: 92-93, *al-Māidah* [5]: 32. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat*, 70-74.

³³ Dalil tentang penjagaan terhadap akal bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat *at-Tin* [95]: 4-6, *al-Baqarah* [2]: 164, *ar-Ra'd* [13]: 3-4, *an-Nahl* [16]: 10-12, *an-Nahl* [16]: 66-69, *ar-Rūm* [30]: 24, *ar-Rūm* [30]: 28, *al-Ankabūt* [29]: 34-35, *al-Baqarah* [2]: 219, *al-Māidah* [5]: 90-91. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat*, 74-87.

³⁴ Dalil tentang penjagaan terhadap keturunan bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat *an-Nisā'* [4]: 3-4, *an-Nisā'* [4]: 22-24, *al-Baqarah* [2]: 221, *an-Nisā'* [4]: 25, *at-Talāq* [65]: 1-7, *al-Baqarah* [2]: 226-237, *al-Ahzāb* [33]: 49, *an-Nūr* [24]: 30-31, *al-Isrā'* [17]: 32, *an-Nūr* [24]: 2-9. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat*, 87-101.

³⁵ Dalil tentang penjagaan terhadap harta bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat *al-Baqarah* [2]: 275-284, *Ali Imrān* [3]: 130, *al-Baqarah* [2]: 188, *an-Nisā'* [4]: 29-32, *an-Nisā'* [4]: 2-6, *al-Māidah* [5]: 38-39, *al-Hujrāt* [49]: 11-12, *an-Nūr* [24]: 27-29, *an-Nūr* [24]: 12-19. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat*, 101-113.



Tabel 1
Perkembangan Formulasi *Maqāshid al-Syari'ah*

Nama	Kitab	Formulasi	Stratifikasi	Komposisi
1. Abu Abdillah Muhammad bin Ali al-Tirmidzi al-Hakim	<i>Al-Shalāt wa Maqāshidihā (al-Ilal wa al-Ilal al-Shar'iyyah wa al-Ilal al-Ubūdiyyah)</i>	Analisis ilat dan rahasia hukum	-	-
2. Abu Manshūr al-Matūridī (w.333 H)	<i>Ma'khadz al-Sharā'i</i>	Term <i>maqāshid al-syari'ah</i>	-	-
3. Abu Bakar al-Qaffāl al-Shāshī (w. 365 H)	<i>Ushul Fiqh wa Maḥāsīn al-Syari'ah</i>	Term <i>maqāshid al-syari'ah</i>	-	-
4. Abu Bakar al-Abhārī (w. 375H)	<i>Kitāb al-Ushul, Kitāb ljmā' Ahl al-Madinah</i>	Analisis ilat-ilat hukum	-	-
5. Al-Bāqilānī (w. 403 H)	<i>Al-Taqrīb wa al-Irshād fī Tartīb Thuruq al-Ijtihād</i>	Analisis ilat-ilat hukum	-	-
6. Al-Juwaynī (al-Haramain) (w. 478 H)	<i>Al-Burhān fī Ushul al-Fiqh</i>	Analisis ilat-ilat hukum	<i>Dlarūrah, Hājjah, Mukarramah, Mandūbah</i>	Agama, Nyawa, Akal, Keturunan
7. Abu Hāmid al-Ghazali (w. 505 H)	(1) <i>Al-Mankhūl min Ta'liqah al-Ushul</i> , (2) <i>Syifā al-Ghalil</i> dan (3) <i>al-Mustashfā min Ilm al-Ushul</i>	Identifikasi ilat-ilat hukum kaitannya dengan <i>mashlahat</i>	<i>Dlarūriyah, Hājjiyah, Tahsinīyah, Tazīniyah</i>	(1) Nyawa, akal, kehormatan, harta, dan agama (2) Agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta
8. Fakh al-Dīn al-Rāzi (w. 606H)	<i>Al-Maḥshūl fī Ilm al-Ushul</i> (ringkasan kitab <i>al-Mu'tamad</i> karya Abu Hasan al-Basri, <i>al-Burhān</i> karya al-Juwayni dan <i>al-Mustashfā</i> karya al-Ghazali)	Analisis ilat-ilat hukum (banyak menghaairkan pikiran al-Juwayni, al-Ghazali dan Hasan Basri)	<i>Dlarūriyāt Hājjiyāt Tahsinīyāt</i>	(1) Nyawa, harta, nasab, agama, dan akal (2) Nyawa, akal, agama, harta, dan nasab

lanjutan ...

15. Najm al-Dīn al-Tūfī (w. 716 H)	<i>Sharh Mukhtasar Rawdah</i> dan <i>al-Ta'yīn fī Sharh al-Arba'in</i>	Spesifik membahas tentang <i>mashlahah</i>	<i>Mashlahah</i> (<i>mu'amalāt</i> dan adat istiadat) didahulukan dari teks (<i>nash</i>) dan <i>ijmā'</i> , (ketika terjadi kontradiksi)	-
16. Taqiy al-Dīn Ibn Taimiyah (w. 728 H)	<i>Qawā'id al-Ahkām</i> dan <i>Majmū al-Fatāwā</i>	Ada kemaslahatan yang dominan di antara dua kemaslahatan dan kerusakan yang dominan di antara dua kerusakan	<i>Dunyawiyah Ukhrawiyah Bāthiniyah</i>	Darah, Harta, Kelamin, Akal, Agama, Akhlaq
17. Abū' Ishāq al-Syāthibī (w. 790 H)	<i>Al-Muwāfaqāt fī Ushul al-Syarī'ah</i> dan <i>al-'tishām</i>	Analisis lafaz <i>amr-nahy</i> —analisis <i>ilat</i> —penentuan makna asal dan makna pelengkap—klasifikasi dalil <i>ta'qqulūy</i> dan <i>ta'abbudūy</i>	<i>Diarūriyah Hājiyah Tahsīniyah</i> (penjagaan dari segi <i>ada/min nāhiyah wujud</i> dan tidak <i>ada/min nāhiyah adam</i>)	Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta

BAB 4

Perkembangan Teori Maqâshid al-Syarî'ah di Masa Modern

A. MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH MENURUT MUHAMMAD THÂHIR BIN ÂSHÛR (W. 1973 M)

Muhammad Thâhir bin Âshûr adalah seorang ulama asal Tunisia yang kembali mengkaji *maqâshid al-syarî'ah*, melalui kitabnya yang berjudul *maqâshid al-syarî'ah al-Islâmiyah*. Ibn Âshûr pernah memberi gagasan agar mengganti teori *ushul fiqh* dengan teori *maqâshid al-syarî'ah*. Baginya *maqâshid al-syarî'ah* adalah ilmu yang independen. Ia mengusung pembahasan tentang *maqâshid al-syarî'ah* sebagai salah satu metode ijtihad yang berdiri sendiri, yang dinamakan dengan *istidlâl al-taqshidî* (pengambilan hukum dengan melihat kepada maksud dan tujuan).¹ Akan tetapi, ada beberapa pihak yang mempertanyakan gagasan Ibn Âshûr, ketika ingin menjadikan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai cara yang independen dalam *istinbât* hukum. Seperti halnya pertanyaan yang diungkapkan oleh Muhammad Thâhir al-Maysâwî di dalam bukunya *Syeikh Muhammad al-Thâhir bin Âshûr wa al-Mashrû' alladzî lam yaktamîl*. Beberapa pertanyaan Maysâwî antara lain: (1) Bukankah *ushul fiqh* telah

¹ *Isnâ'îl al-Hasâni, Nadzariyyah al-Maqâshid 'Inda al-Imâm Muhammad Thâhir bin Âshûr*, (Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1995), 122.



menjelaskan tentang prinsip-prinsip ijtihad dan kaidah-kaidah dalam pengambilan hukum (*istinbât al-hukm*), dan juga cara-cara mendekati teks?; (2) Apakah tidak cukup pengembangan berbagai kaidah penetapan hukum dan penetapan berbagai masalah yang didasarkan pada prinsip *maqâshid al-syarī'ah*, seperti yang dilakukan oleh para ulama terdahulu?

Beberapa pertanyaan ini langsung dijawab oleh Ibn Āshûr, bahwa sebagian besar pembahasan yang terdapat pada *ushul fiqh* masih diperselisihkan oleh para pengkaji. Ibn Āshûr juga menegaskan sebagian masalah yang terdapat dalam *ushul fiqh* tidak memerdulikan hikmah syari'ah dan tujuannya.²

Ide dan gagasan pengembangan *maqâshid al-syarī'ah* perspektif Ibn Āshûr, tak akan bisa lepas dari pengaruh Syâthibi. Bahkan, banyak pihak yang menyamakan karya Ibn Āshûr dengan karya Syâthibi dalam *al-Muwâfaqât*-nya.

Perjalanan Ibn Āshûr dimulai ketika mengajar bagi mazhab Maliki di Masjid Zaitûnah dan di Perguruan Shadiqî, karena ia adalah salah seorang Ulama besar di Tunisia yang bermazhabkan Maliki. Ibn Āshûr juga pernah menjadi *qâdlî* (hakim) dan juga *mufthî*, ia juga giat menulis di majalah dan koran di Tunisia.

Dalam tulisannya yang berjudul *Maqâshid al-syarī'ah al-Islâmiyah*, pada bagian pertama Ibn Āshûr menekankan dan menetapkan adanya *maqâshid al-syarī'ah* dalam suatu hukum. Kemudian ia menandakan akan pentingnya seorang ahli fikih mempelajari *maqâshid al-syarī'ah*, dalam menetapkan suatu

² Muhammad Thâhir al-Maysâwî, *Syeikh Muhammad al-Thâhir bin Āshûr wa al-Mashrû' alladzî lam Yaktamil*, (Yordan: Dâr al-Nafâis, 2001), 66-86. Dan bandingkan dengan tulisan Ibn Āshûr untuk menjawab pertanyaan Maysâwî dalam Muhammad Thâhir Ibn Āshûr, *Maqâshid al-Syarī'ah al-Islâmiyah*, (Yordan: Dâr al-Nafâ'is, 2001), 178-184.



C. MAQÂSHID AL-SYARĪ'AH MENURUT ABDUL WAHHÂB KHALLÂF (W. 1955 M)

Abdul Wahhâb Khallâf menguraikan bahasan tentang *maqâshid al-syarī'ah* dalam kitabnya *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Akan tetapi, ia memasukkan bahasan *maqâshid al-syarī'ah* dalam kategori *al-qawâ'id al-ushûliyyah al-tasyrī'iyah* (kaidah-kaidah pokok pensyariatan). Menurut Khallâf, kaidah ini dipakai oleh para ulama *ushul fiqh* melalui proses induksi terhadap *illah* dan *hikmah* dalam suatu hukum syari'ah. Kaidah ini juga diterapkan di beberapa *nash* (teks) yang menetapkan *ushûl al-tasyrī'* (pokok-pokok pensyariatan) secara umum dan universal. Kewajiban untuk menjaga *ushûl al-tasyrī'* dalam pengambilan suatu hukum juga berlaku untuk hukum-hukum yang tidak tertulis di dalam *nash*. Agar terealisasi pensyariatan suatu hukum, yang sesuai dengan spirit kemaslahatan dan keadilan di antara manusia.⁹

Khallâf membagi *dlarûriyah* menjadi lima hal, akan tetapi ia lebih memilih menggunakan penjagaan terhadap kehormatan (*hifz al-irdh*) dibandingkan keturunan (*hifz al-nasl*). Akan tetapi, inti dari penjagaan kehormatan menurutnya seperti halnya penjagaan terhadap keturunan. Untuk pembahasan selanjutnya, ia hampir sama dengan Wahbah Zuhaylî dalam kitabnya *Nadzariyyah al-Dzarûriyah al-Shar'iyah Muqâranah ma'a al-Qanûn al-Wadh'i*, yang membahas secara terperinci tentang kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *dharar* (bahaya).¹⁰


Madani, t.th.), 93-96.

⁹ Abdul Wahhâb Khallâf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*. (Kuwait: Dâr al-Qalam wa al-Taw-zî', 1987), 197.

¹⁰ *Ibid.*, 205-207.

1. Dampak *mashlahah* dan *mafsadah* tidak hanya di dunia, tapi juga berdampak pada kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, suatu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang baik—walaupun hasilnya tidak secara langsung—maka termasuk kategori amal saleh. Setiap pekerjaan yang diyakini akan membuahkan hasil yang baik di masa sekarang dan yang akan datang adalah termasuk *mashlahah*.
2. *Mashlahah* tidak dinilai dari kenikmatan materi saja, akan tetapi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi tubuh, jiwa, dan roh manusia.
3. *Mashlahah* agama menjadi dasar bagi *mashlahah* yang lain, dan posisinya harus didahulukan.





Bagian Kedua:
Prinsip Dasar Ekonomi Islam
Perspektif & Maqâshid
al-Syarî'ah

Memproduksi sektor *dlarûriyat* harus lebih didahulukan daripada sektor *hâjîyat* dan *tahsîniyât*. Jikalau kebutuhan *tahsîniyât* lebih tercukupi daripada *dlarûriyat*, maka kehidupan manusia akan terancam. Hal ini berseberangan dengan tujuan *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu pewujudan kemaslahatan di antara manusia.

Aktivitas produksi adalah menambah kegunaan suatu barang, hal ini bisa direalisasikan apabila kegunaan suatu barang bertambah, baik dengan cara memberikan manfaat yang benar-benar baru maupun manfaat yang melebihi manfaat yang telah ada sebelumnya.

Ekonom Islam yang cukup *concern* dengan teori produksi adalah Imam al-Ghazali. Ia menganggap pencarian ekonomi bagian dari ibadah individu. Produksi barang-barang kebutuhan dasar secara khusus dipandang sebagai kewajiban sosial (*fardh al-kifâyah*). Jika sekelompok orang sudah berkecimpung dalam memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat sudah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi, maka semua orang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Pokok permasalahannya adalah negara harus bertanggung jawab dalam menjamin bahwa barang-barang kebutuhan pokok diproduksi dalam jumlah yang cukup. Al-Ghazali beralasan bahwa sesungguhnya ketidakseimbangan yang menyangkut barang-barang kebutuhan pokok akan cenderung menciptakan kondisi kerusakan dalam masyarakat.²

² Adiwarman Azhar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Ed. Ketiga, (Jakarta: PT Raja-Grafindo Persada, 2011), 102.



Al-Ghazali menyebutkan bahwa produksi adalah pengerahan secara maksimal sumber daya alam (*raw material*) oleh sumber daya manusia, agar menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia.³ Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan yang moderat menimbulkan dua implikasi, yaitu:⁴

1. produsen hanya menghasilkan barang/jasa yang menjadi kebutuhan (*needs*), meskipun belum tentu merupakan keinginan (*wants*) konsumen. Barang/ jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat riil bagi kehidupan yang islami, bukan sekedar memberikan kepuasan maksimum bagi konsumen. Karenanya prinsip *consumer satisfaction* atau *given demand hypothesis* yang banyak dijadikan pegangan bagi produsen kapitalis, tidak dapat diimplementasikan begitu saja.
2. kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang/jasa secara berlebihan tidak saja menimbulkan mis-alokasi sumber daya ekonomi dan kemubaziran (*wastage*), tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat. Semakin menipisnya persediaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu masalah serius dalam pembangunan ekonomi modern saat ini.

Ada beberapa kaidah dalam berproduksi yang ditemukan dalam fikih ekonomi Umar bin Khattâb, di antaranya: *pertama*, aspek akidah yang muncul karena seorang Muslim dalam setiap aktivitas perekonomiannya tercakup dalam wilayah ibadah; *kedua*, aspek ilmu yang mana seorang Muslim haruslah mem-

³ Abdur Rahman, *Ekonomi Al-Ghazali: Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihyâ' Ulâmuddîn*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 102-103.

⁴ P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 233.



akan bisa berdiri dengan sendirinya. Semuanya memerlukan suatu pengaturan yang baik, berupa suatu organisasi, ataupun suatu manajemen yang bisa menertibkan, mengatur, merencanakan, dan mengevaluasi segala kinerja yang akan dan telah dihasilkannya oleh masing-masing divisi. Di dalam Al-Qur'an, kata-kata yang berkaitan dengan manajerial diungkapkan dalam beberapa bentuk, yaitu *yudabbiru*,¹¹ *yatadabbarûn*,¹² *yatadabbar*,¹³ dan *al-mudabbirât*.¹⁴

5. Teknologi

Di era kemajuan produksi yang ada pada saat ini, teknologi mempunyai peranan yang sangat besar dalam sektor ini. Berapa banyak produsen yang kemudian tidak bisa *survive* karena adanya kompetitor lainnya dan lebih banyak yang bisa menghasilkan barang/jasa jauh lebih baik, karena didukung oleh faktor teknologi. Misalnya ketika seorang tenaga kerja menjahit sebuah baju dengan menggunakan mesin jahit biasa, dalam satu jam ia bisa menghasilkan 100 tusukan. Hal ini berbeda jika dikerjakan oleh mesin yang telah canggih karena kemajuan teknologi, maka dalam satu jam teknologi tersebut akan bisa menghasilkan 100.000 tusukan. Maka akan terlihat suatu persaingan yang tidak seimbang antara produsen yang tidak menggunakan teknologi dan produsen yang menggunakan teknologi dalam aktivitas produksinya.

¹¹ Lihat lebih lanjut, QS. *Yûnus* [10]: 3 & 31, *al-Ra'd* [13]: 2, *As-Sajdah* [32]: 5.

¹² Lihat lebih lanjut, QS. *an-Nisâ'* [4]: 82 & *Muhammad* [47]: 24.

¹³ Lihat lebih lanjut, QS. *al-Mu'minûn* [23]: 68 & *al-Shâd* [38]: 29.

¹⁴ Lihat lebih lanjut, QS. *al-Nâjijât* [79]: 5.

E. AKTIVITAS PRODUKSI BERTUJUAN UNTUK MASHLAHAH

Ekonomi konvensional kadang melupakan ke mana produknya mengalir, sepanjang efisiensi ekonomi tercapai dengan keuntungan yang memadai. Pun jika yang mengonsumsi barang/jasa tersebut hanya kalangan tertentu yang berakibat pada timbulnya budaya konsumerisme. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengaitkan tujuan produksi dengan kemaslahatan. Apabila produksi *basic need/dlarûriyah* menjadi suatu prioritas, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena segala macam kebutuhan pokok mereka telah terpenuhi. Adapun tujuan produksi menurut Monzer Kahf antara lain:²⁴

1. Upaya manusia untuk meningkatkan—tidak hanya—kondisi materialnya. Akan tetapi juga moralnya untuk kemudian menjadi sarana mencapai tujuannya kelak di akhirat. Sehingga produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya akan dilarang dalam Islam.
2. Aspek sosial dalam produksi, yaitu distribusi keuntungan dari produksi itu sendiri di antara sebagian besar orang dengan cara seadil-adilnya. Hal tersebut merupakan tujuan utama ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi Islam lebih terkait dengan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan sistem yang lainnya.
3. Masalah ekonomi bukanlah masalah yang jarang berkaitan dengan kebutuhan hidup, akan tetapi permasalahan tersebut timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah Allah.

²⁴ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam. (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, terj. Machnun Husein dari judul aslinya "The Islamic Economy. Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 36-38.



4. Mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, berlebihan, dan merusak lingkungan.
5. Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan buruh.

Kaitannya dengan prinsip produksi dalam ekonomi Islam, M.M. Metwally berpendapat bahwa fungsi kepuasan perusahaan (produsen) tidak hanya dipengaruhi oleh variabel tingkat keuntungan, tetapi juga oleh variabel pengeluaran yang bersifat sosial dalam bentuk *charity* atau *good deeds*. Oleh karena itu, perusahaan islami harus dapat mencapai tingkat keuntungan yang wajar guna mempertahankan kegiatan usahanya dengan mencoba memaksimalkan fungsi daya guna. Fungsi daya guna tersebut merupakan fungsi dari jumlah pengeluaran untuk sedekah, dengan kendala keuntungan setelah pembayaran zakat, yang besarnya kurang dari tingkat minimum yang aman buat perusahaan. Pengeluaran perusahaan untuk *charity* atau *good deeds* akan meningkatkan permintaan akan produksi. Berarti tingkat pengeluaran untuk sedekah menghasilkan efek pengandaan terhadap kenaikan kemampuan beli masyarakat.²⁶

Tujuan seorang konsumen dalam mengonsumsi barang/jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencari *mashlahah* maksimum, begitu juga dengan produsen. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi yaitu meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya:²⁷

²⁶ Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, terj. M. Husein Sawit, (Jakarta: PT Bangkit Daya Insana, 1995), 36-37.

²⁷ P3EI, *Ekonomi Islam*, 233.



وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا
بُنَيَّ اِرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (٤٢)

Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: "Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir."

(2) QS. *al-Qamar* [54]: 13-14

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوْحِ وَدُسِّرَ (١٣) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ
كُفِرًا (١٤)

Dan Kami angkat Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku, (13) yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh)." (14)

Dalam Al-Qur'an diceritakan tentang bagaimana Nabi Nuh dan umatnya membuat bahtera (perahu) yang sangat besar, untuk bisa menampung orang-orang yang beriman dari banjir besar.



Prinsip Dasar Distribusi dalam Ekonomi Islam

A. MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI KEADILAN DISTRIBUSI

Salah satu bidang yang terpenting dalam pembahasan tentang ekonomi adalah distribusi pendapatan. Pembahasan tentang distribusi menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Bisa jadi hal itu berkaitan erat dengan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan manajemen.

Kaitan distribusi dengan tanah adalah bagaimana alokasi dana untuk menyewa tanah sebagai tempat berkembangnya suatu aktivitas produksi. Pembahasan tentang modal akan berkaitan erat dengan bagaimana alokasi dana untuk membayar hasil bagi modal yang diperoleh dari *shâhibul mâl*. Hal ini sangat berseberangan dengan sistem konvensional yang menyertakan perhitungan bunga bagi pinjaman modal. Tentunya hal ini sangatlah kontradiktif dengan sistem ekonomi Islam, yang melarang praktik riba. Ketika berbicara tentang tenaga kerja, yang berkaitan dengan distribusi pendapatan di sana adalah bagaimana proses penggajian dan pengupahan tenaga kerja. Di beberapa kitab Hadis ada banyak sekali panduan tentang ketenagakerjaan. Inti dari aturan tersebut yaitu Islam sangat

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berada dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Islam mewajibkan umatnya untuk menjadi kaya, hal itu bisa dilacak dalam suatu Hadis, bahwa “Kemiskinan akan mendekatkan seseorang ke dalam kekafiran.” Bukti lainnya adalah dalam sebuah kitab yang berjudul *al-Ihtisâb fi Rizq al-Mustahab* dijelaskan tentang siapakah yang akan masuk surga terlebih dahulu, apakah orang miskin yang bersabar ataukah orang kaya yang bersyukur. Kenyataan yang ada, banyak ulama yang setuju bahwa orang kaya yang bersyukur (dengan berbagai standardisasi bentuk syukur yang memang sangat berat dalam mempraktikkannya), akan masuk surga terlebih dahulu. Dalam suatu Hadis juga disebutkan, “Seseorang akan terputus amalannya kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orangtuanya.” Bagaimana mungkin seseorang bisa beramal jariyah ketika tidak mempunyai harta benda, bagaimana pula seseorang bisa menuntut ilmu jika tidak mempunyai bekal harta, dan bagaimana pula seseorang bisa mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang saleh jika tidak mempunyai sarana untuk mewujudkannya. Sebenarnya masih banyak lagi bukti yang menyatakan bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk menjadi kaya.



(5) Kesenjangan sosial

Zakat juga berperan dalam mendistribusikan pendapatan, khususnya dalam mengurangi kesenjangan sosial atau gap pendapatan yang pada akhirnya akan meminimalisasi kesenjangan sosial.

Penggunaan zakat tidak perlu dibatasi dengan batasan jangka pendek. Sebagian penulis Muslim ternyata lebih menekankan pada upaya pengayaan orang-orang fakir dan miskin dengan memberikan alat produksi kepada mereka. Dan juga menyediakan modal, berbagai keterampilan, latihan, dan pekerjaan, agar mereka dapat meningkatkan penghasilannya, sehingga kehidupan mereka akan lebih baik di masa mendatang.⁵

3. Hukum Warisan

Hukum waris dalam Islam—barangkali—hanyalah satu-satunya di dunia yang memakai pola distribusi yang berbasis sangat luas. Hukum ini tidak saja menjadikan anak-anak almarhum, baik lelaki maupun perempuan menjadi pewaris yang sah, tetapi juga istri atau suami, orangtua ataupun kakek/nenek, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Jikalau almarhum tidak memiliki orangtua ataupun anak, maka harta peninggalan bisa saja diberikan kepada saudara-saudara dan terkadang juga saudara jauhnya. Akan tetapi jika almarhum tidak memiliki siapa pun, maka hartanya akan diambil oleh negara untuk kemudian dialokasikan untuk menyejahterakan masyarakat.⁶

⁵ *Ibid.*, 83-84.

⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rasyidi dari judul aslinya *Fundamental of Islamic Economic System*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012), 79.



Prinsip dasar warisan tercantum dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat *an-Nisâ'*. Para ahli fikih memerinci ada tiga ahli waris, yaitu: penerima bagian (*sharers*), para penerima sisa waris (*residuaries*), dan kerabat jauh (*distant kindreds*). Jika pewaris sah tidak ada, maka harta akan menjadi milik *baitul mal*. Dengan adanya hukum waris ini, konsentrasi kekayaan bisa dicegah dan tidak terpaku pada satu orang saja.

4. Hukum Wasiat

Wasiat atau *law of will* tidak berlaku bagi ahli waris, dan juga tidak boleh melebihi sepertiga dari keseluruhan harta. Hukum wasiat mengilhami kaum Muslimin yang kaya untuk memberikan hartanya di jalan Allah, untuk tujuan yang baik, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam hukum Islam, hal ini bisa saja diwujudkan dalam bentuk wakaf, dana perwalian, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, hukum ini mendorong jihad melawan kemiskinan, kesengsaraan, penyakit, kebodohan, dan buta huruf.⁷ Akan tetapi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta, agar hak-hak ahli waris bisa tetap terjaga.

5. Hukum Wakaf

Wakaf berarti membaktikan harta kepada Allah, dengan demikian harta itu mengalir dari pemberi wakaf (*wâqif*) kepada Allah. Akan tetapi hasil ataupun manfaatnya dibaktikan kepada masyarakat yang membutuhkan: fakir miskin, orang sakit, perantau, dan lain sebagainya. Dengan demikian, distribusi kekayaan bisa merata.

⁷ Chaudhry, *Sistem*, 85.



jaman kepada orang lain yang terdesak akan kebutuhan daruratnya. Ketika ia mengikhhlaskan pinjaman yang diberikannya tersebut, hal itu adalah bagian dari *qard hasan*. Seakan-akan ia meminjamkan hartanya kepada Allah, karena seseorang yang terdesak kebutuhan pokoknya termasuk seseorang yang berada dalam naungan Allah. Tugas manusia adalah menyelamatkan saudaranya yang lain dari kesusahan hidup, yang mengakibatkan kematian.

10. Memberi Makan Kaum Miskin

Banyak sekali perintah untuk memberi makan kaum miskin. Dan, ini merupakan suatu ibadah yang juga bernilai tinggi dalam Islam dan berperan serta dalam pendistribusian kekayaan. Dalam suatu Hadis disebutkan, "Abu Hurairah melaporkan kepada Rasulullah bahwa ada seseorang yang mengeluh tentang kesusahan hatinya: Beliau bersabda: Usapkan tanganmu ke kepala anak yatim dan berilah makan orang miskin."¹⁵ Dalam Hadis lainnya yaitu, "Sedekah terbaik adalah mengenyangkan perut yang lapar."¹⁶ Simak juga Hadis ini, "Bertakwalah kepada Allah Yang Maha Pengasih, berilah makanan dan sebarkanlah keselamatan, maka kalian akan memasuki surga dengan selamat."¹⁷

11. Kurban (*udhhiyah*) dan *Aqîqah*

Kurban adalah binatang dikeluarkan pada hari Tasyrik di Hari Raya Idul Adha, berbentuk kambing, sapi, dan onta, dilaksanakan satu tahun sekali. Adapun *aqîqah* adalah memotong kambing (satu untuk perempuan dan dua untuk laki-laki) di

¹⁵ HR. Ahmad.

¹⁶ HR. Baihaqi dari Anas.

¹⁷ HR. Tirmidzi dan Ibn Majah dari Abdullah bin Amr.



negara walaupun pendapatan per kapitanya naik dua kali lipat, akan tetapi jika angka pengangguran tidak berkurang, angka kemiskinan tidak berkurang, dan distribusi pendapatan tidak merata, maka negara tersebut belum bisa diyakini telah berhasil melakukan pembangunan dengan baik. Strategi pembangunan berbasis Islam mengubah paradigma ini dengan menyajikan beberapa elemen penting, yaitu:¹⁹

Pertama, seluruh keinginan agen ekonomi tidak dapat dilooskan kecuali harus melewati saringan dari dua filter, yaitu: (1) *mashlahah syar'iyah*; dan (2) mekanisme harga di pasar.

Kedua, agen ekonomi perlu dimotivasi untuk melakukan pemuasan kebutuhan dengan cara tidak membahayakan lingkungan.

Ketiga, perlu diadakan restrukturisasi dalam bidang sosio-ekonomi dengan tujuan untuk mengurangi konsentrasi kekayaan yang beredar di kalangan tertentu, menghapuskan pola konsumsi pamer, hura-hura, dan mereformasi sistem keuangan untuk mewujudkan dua tujuan di atas.

Kemudian sehubungan dengan pembagian barang dan kebajikan, beberapa perkara yang menjadi tujuan dalam Islam sebagai berikut:²⁰

1. Setiap individu menerima pendapatan sekurang-kurangnya sampai tingkat yang mencukupi kehidupannya yang layak.
2. Kekayaan jangan sampai dimiliki oleh segelintir golongan saja.

¹⁹ Mustafa Edwin Nasution, et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada, 2006), 147.

²⁰ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, terj. Anas Sidik dari judul aslinya *The Economic Enterprise in Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 93-94.



BAB 7

Prinsip Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Islam

A. KONSEP ISLAM TENTANG KEBUTUHAN

Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan dan keinginan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Di mana setiap individu mempunyai suatu kebutuhan yang akan diterjemahkan oleh keinginan-keinginan mereka. Seseorang yang sedang membutuhkan makan karena perutnya yang lapar, akan mempertimbangkan beberapa keinginan dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Misalnya ketika beberapa orang 'membutuhkan' makanan karena rasa laparnya, maka seseorang yang berasal dari Jawa Timur akan 'menginginkan' soto lamongan ketika merasa lapar, hal ini berbeda dengan orang Sulawesi yang saat itu menginginkan coto makassar. Atau orang Eropa yang menginginkan *sandwich*, orang Arab yang menginginkan *kushari*. Keinginan seseorang akan sangat berkaitan erat dengan konsep kepuasan. Selanjutnya yang menjadi masalah adalah apabila keinginan tersebut berkembang dan masuk ke area lampu merah, yaitu area pemenuhan kebutuhan dengan cara berlebih-lebihan dan mubazir. Maka keinginan inilah yang kemudian bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Ketika seseorang 'membutuhkan' makan untuk mengisi perutnya yang



konsumerisme. Karena manusia banyak yang memaksakan keinginan mereka, seiring dengan beragamnya varian produk dan jasa. Misalnya seseorang yang lapar dan membutuhkan makan, maka ia bisa memilih sepiring makanan dari warung, restoran biasa ataupun restoran yang berkelas. Banyak kalangan yang memprioritaskan keinginan mereka karena tuntutan gaya hidup daripada mempertimbangkan kemaslahatan yang ada. Maka ada baiknya dilakukan pemisahan antara kebutuhan dan keinginan, untuk menjembatani beberapa keinginan yang tak terbendung. Dan lagi-lagi ekonomi Islam mendorong perilaku konsumsi manusia yang didasari oleh faktor kebutuhan (*needs*) dan bukan faktor keinginan (*wants*).

Memenuhi kebutuhan—dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan—yaitu tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha untuk pencapaian tujuan tersebut merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Siddiqi (1979) menyatakan, bahwa tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam antara lain: (1) memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana; (2) memenuhi kebutuhan keluarga; (3) memenuhi kebutuhan jangka panjang; (4) menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan; dan (5) memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.³ Beberapa pandangan tersebut mempunyai satu tujuan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun beberapa sifat *mashlahah*, antara lain:

1. *Mashlahah* bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan

³ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, terj. Anas Sidik dari judul aslinya "The Economic Enterprise in Islam", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 15.



1. Tingkat di mana lima elemen pokok di atas dilindungi dengan baik.
2. Tingkat di mana perlindungan lima elemen pokok di atas dilengkapi untuk memperkuat keberadaannya.
3. Tingkat di mana lima elemen pokok di atas secara sederhana diperoleh secara lebih baik.⁵

B. KONSEP MASHLAHAH DALAM KONSUMSI SESUAI DENGAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH

Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan mempunyai tujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. *Utility* secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*), atau menguntungkan (*advantage*). Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengonsumsi suatu barang. Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa "tertolong" dari suatu kesulitan karena mengonsumsi barang tersebut. Dikarenakan adanya rasa inilah, maka sering kali utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang. Jadi, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan merupakan akibat yang ditimbulkan oleh utilitas.⁶

Maka ketika tujuan konsumsi selalu identik dengan perolehan suatu kepuasan yang tertinggi, beberapa hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah apakah barang atau jasa tersebut

⁵ Muhammad, *Ekonomi*, 154.

⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (Kerjasama UII dengan BI), 2008), 127.



sah. Sebelum akhirnya dibelanjakan untuk suatu barang/jasa, dengan cara yang baik pula. Untuk lebih jelas lagi, lihat gambar di bawah ini:



Gambar 1
Income dan Expenditure dalam Ekonomi Islam

Income dan *expenditure* haruslah diatur oleh suatu anggaran dengan penghitungan yang cermat. Perolehan *income* sudah diatur dengan jelas dalam Islam, sehingga nantinya berimplikasi pada label halal ataupun haram dalam *income* tersebut. Sangat banyak teks Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan dengan sangat terperinci tentang bagaimana mekanisme pencarian rezeki yang berimplikasi pada keberkahan dalam konsumsi. Seperti yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang maknanya adalah: "Ambillah apa yang halal dan tinggalkanlah apa yang haram."¹²

¹² Diriwatikan oleh Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah.



H. KONSUMERISME VS. KESEIMBANGAN KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM

Ibn Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah* menguraikan beberapa hal yang mendasari larangan pemborosan. Efek terhadap negara antara lain: (1) dapat melemahkan negara; (2) bisa mengurangi anggaran belanja negara; (3) mengakibatkan timbulnya korupsi; (3) melahirkan mental 'rendahan' yang penuh dengan niat-niat yang buruk; (4) menghancurkan keutuhan negara; dan (5) melemahkan generasi muda. Kemudian efek negatif pemborosan terhadap ekonomi dan juga pelakunya antara lain: (1) menaikkan pajak dan bea cukai; (2) kehancuran ekonomi suatu negara; (3) melesukan perekonomian; (4) menimbulkan sifat suka pamer yang melampaui batas.³¹

Islam memberikan sikap yang tegas untuk budaya konsumerisme, yaitu pelarangan terhadap sesuatu yang berlebihan, dan tidak mendatangkan manfaat. Disebutkan di dalam Al-Qur'an:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ أَمْوَالَهُمْ بِتَبْدِيلٍ (٢٦)

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (26) Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27).³²

³¹ Ibn Khaldun, *Muqaddimah al-Allāmah Ibn Khaldun*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), 311.

³² QS: *al-Isrā'* (17): 26-27.



Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, konsumerisme dipahami sebagai paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan. Konsumerisme juga diartikan sebagai gaya hidup yang tidak hemat.

Kemudian yang termasuk konsumerisme yaitu bermewah-mewahan (*al-Isrâf*),³⁸ walaupun sebenarnya boros dan mewah bukanlah dua kata yang bersinonim. Di dalam kemewahan terdapat unsur pemborosan, namun orang yang hidup boros tidak selalu mewah. Betapa banyak kita menemukan manusia yang membelanjakan hartanya untuk membeli minuman keras, narkotika, dan barang memabukkan yang lainnya, sedangkan ia hidup di dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Mereka pemboros, tetapi bukan orang yang hidup mewah. Lebih tepatnya, setiap orang yang hidup mewah pasti boros, tetapi tidak setiap pemboros itu hidup mewah.

Di dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ (٤١) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (٤٢)
 وَظِلٍّ مِنْ يَحُمُومٍ (٤٣) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (٤٤) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ
 مُتْرَفِينَ (٤٥) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ (٤٦)

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu. (41) Dalam (siksaan) angin yang sangat panas dan air yang mendidih, (42) dan dalam naungan asap yang hitam. (43) Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

³⁸ Kata سرف ditulis di dalam Al-Qur'an sebanyak 23 kali dengan *shfghah* f'îl, *masdar* dan isim *fâil*. Lihat *Maktabah al-Syâmilah al-Isdhâr* 2,8, *Masâil Fiqhiyah: Mushkilah al-Saraf fi al-Mujtama' al-Muslim wa 'Ilâjuhâ fi Dhawi al-Islâm*, Vol. 1, h.31.



lain yang melarang seseorang untuk bersenang-senang.⁴⁸ Sikap mengekang diri untuk menikmati kehidupan dilarang dan diktuk, asetisisme juga ditolak di dalam Islam.⁴⁹ Telah disebutkan di dalam Al-Qur'an:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَتَفَصَّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣٢)

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengtahui.⁵⁰

Namun dalam bersenang-senang harus ada keseimbangan. Islam menginginkan keseimbangan di dalam segala hal, begitu juga di dalam urusan yang berkaitan dengan harta benda. Islam mengharuskan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi; seimbang dalam hal modal dan usaha, seimbang dalam hal produksi dan konsumsi, dan juga yang lainnya. Islam melarang seseorang untuk melakukan suatu pemborosan, hidup dalam keadaan yang berlebih-lebihan, dan juga kebalikan dari hal ini

⁴⁸ Misalnya, di dalam Agama Masehi Rahib dilarang untuk bersenang-senang, begitu juga di dalam ajaran Manu di Persi, dan Sufi di India. Lihat Qardhāwī, *Dawr al-Qiyām*, 217.

⁴⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, terj. Anas Sidik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 18.

⁵⁰ QS. *al-A'raf*[7]: 32.



yaitu hidup dalam keadaan yang bakhil dan kikir. Islam juga mendorong seseorang untuk bisa mendapatkan fasilitas yang baik dalam hidupnya, hal ini bisa dilacak di sebuah Hadis yang menyatakan bahwa empat faktor kebahagiaan dunia antara lain: pasangan yang saleh, rumah yang luas, kendaraan yang baik dan tetangga yang baik.



2. *Mushaqqar* (Terletak di suatu kota terkenal di Hijar (Bahrain), dimulai pada Jumadil Awal, dan berlangsung sebulan penuh).
3. *Suhar* (Salah satu kota di Oman, pekan bisnis berlangsung di kota ini selama lima hari penuh pada bulan Rajab).
4. *Dabba* (Salah satu dari dua kota pelabuhan Oman, biasanya yang berdagang di sana saudagar dari India, Sind, China, dan lain sebagainya).
5. *Shihr (Mahârah)*. (Di sebelah pantai laut Arabia, antara Aden (Yaman) dan Oman, pekan bisnis berlangsung pada awal sampai pertengahan bulan Sya'ban).
6. *Aden* (Di Yaman pada 1-10 Ramadhan).
7. *San'a* (di Ibu Kota Yaman, pada 10 sampai akhir Ramadhan).
8. *Rabiyah* (Kota Hadramaut Yaman, pada 15 Dzulqad'ah selama 1 bulan penuh).
9. *Ukaz* (Di ujung Najd dekat dengan Thaif [masih di sekitar Mekkah], pasar ini juga merupakan tempat berkumpulnya banyak suku Arab dan juga para penyairnya untuk berbalas syair).
10. *Dzul Majâz* (dekat Ukaz, di antara Ukaz dan Mekkah, berlangsung tanggal 1-7 Dzulhijjah).
11. *Minâ* (Selama musim Haji).
12. *Nazat* (Dekat Khaibar, pada tanggal 10 sampai akhir bulan Muharram).
13. *Hijr* (Kota di Yamamah, pada tanggal 10 sampai akhir bulan Muharram).
14. *Busyrâ* (kota di Syria, di luar semenanjung Arabia dan sering didatangi oleh Nabi SAW).

Jual beli yang tidak jelas adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*.¹⁷ *Gharar* adalah adanya ketidakjelasan barang yang akan dijual dan juga adanya keragu-raguan dalam mendapatkan salah satu barang pengganti dalam jual beli.

Menurut sebagian dari Hanafiyah, *gharar* adalah ketidakjelasan barang yang akan diperdagangkan. Menurut sebagian dari Malikiyah, *gharar* adalah ketidakjelasan mendapatkan salah satu pengganti dalam jual beli ataupun ketidakjelasan maksud jual beli tersebut. Sebagian dari Malikiyah mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang muncul, yaitu antara yang baik dan yang cacat. Menurut Syafi'i, *gharar* adalah sesuatu perkara yang tak terlihat, begitu juga dengan akibatnya. Adapun menurut Hanabilah, *gharar* adalah sesuatu yang tak terlihat kebenarannya dan tertutupi sisi dalamnya ataupun adanya keragu-raguan di dalam penerimaan barang dan ketidakadaannya barang tersebut.

Walaupun ada beberapa perbedaan secara etimologi tentang makna *gharar* di antara beberapa ulama di atas, akan tetapi inti dari arti *gharar* adalah satu, yaitu adanya unsur ketidakjelasan terhadap barang yang akan diperjualbelikan.¹⁸ Sebagai contoh, *gharar* yang terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. *Gharar* dalam kualitas seperti yang terjadi di dalam kasus ijon, di mana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga X. Dalam hal ini belum diketahui kuantitas buah yang akan dipanen nantinya. *Gharar* dalam kualitas seperti yang terjadi

¹⁷ Abdullah Abdul Husein al-Tariqi, *Al-Iqtishād al-Islāmi: Ushūsun wa Mubāun wa Ahdhāf*, terj. M. Irfan Shafwani (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), 185.

¹⁸ Samīrah, *Al-Wajīz*, 33.



sudah berfluktuasi dari harga yang rendah menuju harga yang tinggi, atau sang pedagang dapat memindahkan barangnya ke negeri yang lain di mana permintaan di tempat itu lebih banyak daripada kota asalnya."³⁴

³⁴ Adiwarmam, *Sejarah Pemikiran*, 404.

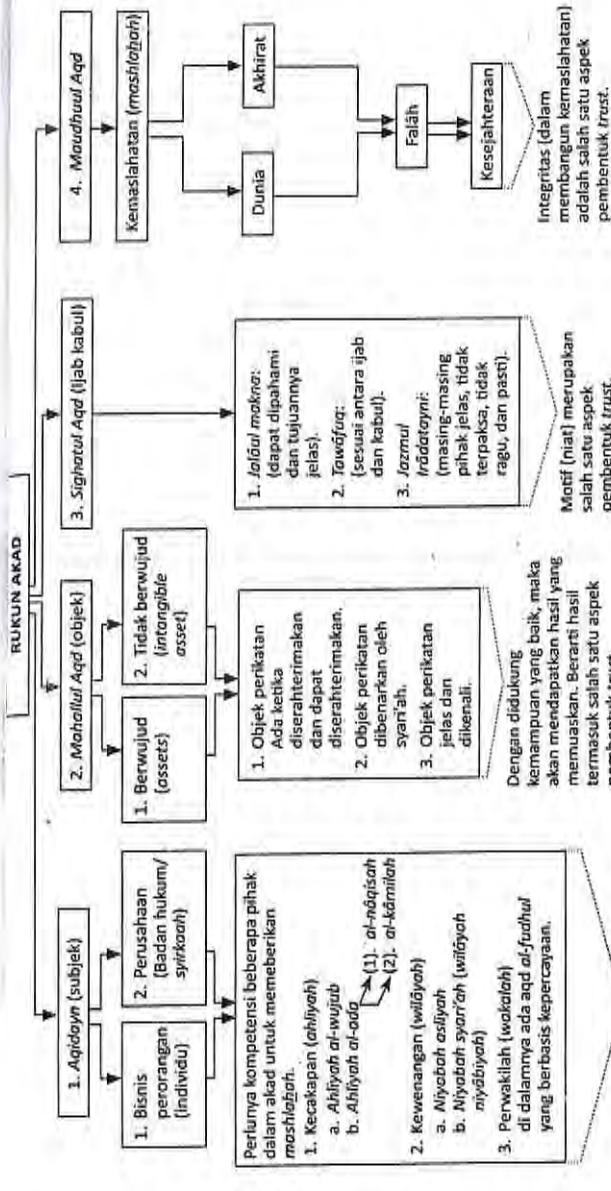


A. HARTA (MÂL) DAN KEKAYAAN DALAM ISLAM

Memiliki harta dan memproduksi barang-barang yang baik adalah sah menurut Islam. Namun, kepemilikan harta itu bukanlah tujuan akan tetapi sarana untuk menikmati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat memproduksi hingga terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada manusia yang bersedia menjadi konsumen dan jika daya beli masyarakat berkurang karena sifat kikir yang melampaui batas, maka cepat atau lambat roda produksi niscaya akan terhenti, selanjutnya perkembangan bangsa pun terhambat. Oleh sebab itu, beberapa negara industri berusaha memberi bantuan keuangan pada negara berkembang dengan jumlah puluhan bahkan ratusan juta dollar. Ini dilakukan bukan karena mereka suka berderma, bukan pula kerana ingin berbuat baik, melainkan semata-mata untuk menciptakan daya beli terhadap produk-produk mereka.¹

¹ Yusuf al-Qardhâwî, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlâq fi al-Iqtishâd al-Islâmi* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 199.





1. Ada beberapa kalangan yang tidak boleh melakukan akad. Hal ini mencerminkan pentingnya kemampuan dalam membangun *trust*.
2. Dalam bisnis Islam, ada ketentuan tentang *marhalah al-rushd*. Hal ini menunjukkan bahwa *trust* dalam bisnis Islam memerlukan kemampuan.

Gambar 1 Tujuan Transaksi adalah *Maqāshid al-Syarī'ah*

Sumber: Ika Yulia Fauzla, 2013.

pasar, datang dari sisi al-Āliyah dan masyarakat berada di sisi keduanya. Lalu Beliau menemukan kambing mati, memegang dan mengambil kupingnya. Kemudian Beliau bersabda: "Siapa yang mau membeli ini seharga satu dirham?" Para sahabat lalu menjawab: "Kami tidak mau, karena itu tidak ada gunanya bagi kami!" Beliau bersabda: "Apakah kamu mau mengambilnya tanpa bayar?" Mereka menjawab, "Sekiranya masih hidup, ia bercacat, apalagi telah mati." Lalu Beliau bersabda, "Demi Allah, Dunia ini lebih tidak berarti dalam pandangan Allah daripada kambing mati ini dalam pandanganmu."³⁶

Rasulullah SAW pun mengungkapkan tentang keberadaan dunia, dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda: "Apalah arti hidup duniawi ini bagiku, aku di dunia ini tak ubahnya seperti pengendara yang berlindung di bawah sebuah pohon, kemudian ia pergi dan meninggalkan pohon itu."³⁷

³⁶ Hadis Riwayat Muslim, Tirmidzī, Ibn Mājah, Al-Dārimy dan Ahmad bin Hanbal.

³⁷ Hadis Riwayat Tirmidzī.



Kamil Centre for Islamic Economy Research). Ia juga beberapa kali menjuarai lomba penulisan karya ilmiah, kolom, cerpen, puisi dan kaligrafi. Tulisan-tulisannya berupa makalah, opini, kolom, cerpen dan puisi tersebar di beberapa jurnal, media massa, dan juga internet.

Saat ini Ia mengajar STIE Perbanas Surabaya untuk beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan Ekonomi Islam dan Kewirausahaan, ia juga telah menghasilkan beberapa penelitian yang telah diseminarkan di beberapa proceeding nasional dan internasional dan dipublikasikan di beberapa jurnal ilmiah, di antaranya adalah Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online (Jurnal Islamica, 2015); Membangun Ekonomi Pedesaan dengan Financial Inclusion Melalui Lembaga Keuangan Syariah (Jurnal al-Nisbah, 2015); Mendeteksi Kebangrutan Secara Dini Perspektif Ekonomi Islam (Jurnal EKUITAS, 2015), Pemanfaatan E-Commerce dan M-Commerce dalam Bisnis di Kalangan Wirausahawan Perempuan (Journal of Business and Banking, 2015); Transcendental Trust in Online Business Among Garments Entrepreneurs in Indonesia (ICBB, 2016); Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah dalam Maqashid al-Shariah (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016), Perilaku Impulse Buying Pada Produk Woman Fashion di Kalangan Konsumen Bisnis Online (Penelitian, 2016).

Beberapa karyanya dalam bentuk buku referensi yang telah terbit adalah *Etika Bisnis dalam Islam* (Prenadamedia Kencana, Cetakan pertama, 2013; cetakan yang kedua 2014; dan cetakan ketiga, 2016), *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid al-Sharī'ah* (Prenadamedia Kencana, Cetakan pertama, 2014 dan cetakan yang kedua 2015), *Bahasa Arab untuk Bisnis* (Pre-



Agama. Mengikuti Higher Education Management Training di Leeds University, England (2007), menjadi pembicara pada konferensi internasional tentang *Human Right and the Renewal of Religious Discourse* di Alexandria, Egypt (2006), pembicara dalam konferensi internasional tentang *Islam and Modernity* di Catholic University of America, Washington D.C. (2010), mengikuti *Training on Islamic Business and Entrepreneurship*, di Sidney University (2011 & 2012). Menjadi penerjemah Bahasa Inggris di Indonesian Consulate General, Cape Town South Africa, 2000–2004 dan bahasa Arab-Inggris-Arab di Ministerial Forum of Islamic Countries (kerja sama Negara-negara Islam sedunia tentang sistem perpajakan), Nusa Dua Bali 2010. Ia juga pernah mengajar mata kuliah Islamic History and Civilization, pada Islamic College of Southern Africa (ICOSA), Cape Town, South Africa, 1999 – 2000.

Aktivitasnya saat ini adalah dosen fakultas Ushuluddin dan Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, serta Direktur Pesantren Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Menulis dan menerjemahkan beberapa buku, dan aktif mengisi seminar di dalam dan luar negeri yang berkaitan dengan kajian agama, filsafat Islam dan modernitas dan kajian-kajian tasawuf. Ia akan mencoba menulis versi Inggris buku ini untuk ditawarkan kepada Sidney University.

